

PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

THE EFFECT OF TRANSPARENCY, COMPETENCY AND FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT WITH THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL SYSTEM AS A MODERATION VARIABLES

Ria Herlina¹, Taufeni Taufik², Azwir Nasir³
Universitas Riau^{1,2,3}
ria_alfian66@yahoo.co.id¹

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of transparency, competency, financial accounting systems on the accountability of regional financial management with the government's internal control system as a moderating variable with a case study in Indragiri Hulu Regency. The population of this study were all employees in all OPDs in Indragiri Hulu Regency as many as 45 OPDs so that a sample of 180 respondents was obtained from this population using the purposive sampling method. The data analysis method used in this research is the quantitative analysis method with WarpPLS version 6.0 as data processing software. The results show that transparency, competency, and financial accounting systems affect the accountability of regional financial management, the implementation of the government internal control system can moderate the effect of transparency and financial accounting systems on the accountability of regional financial management, and the implementation of the government internal control system cannot moderate the effect of competency on the accountability of regional finance management.

Keywords: *Transparency, Competency, Financial Accounting System, The Accountability of Regional Financial Management, Implementation of The Government Internal Control System*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, kompetensi, sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel pemoderasi dengan studi kasus di Kabupaten Indragiri Hulu. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di seluruh OPD di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 45 OPD sehingga didapatkan sampel sebanyak 180 responden dari populasi tersebut dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan software pengolah data WarpPLS versi 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi dan sistem

akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan Sistem pengendalian intern pemerintah belum dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Transparansi, Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

PENDAHULUAN

Kebutuhan informasi laporan keuangan saat ini khususnya di kalangan masyarakat semakin besar. Informasi yang disajikan sektor publik harus mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban, tetapi harus patuh dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pelaporan keuangan dari semua entitas pemerintahan daerah harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu dan transparan. Jika hal tersebut dapat dilakukan, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Suharti & Tannia, 2020).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sepanjang tahun 2015 terungkap ada 16.702 temuan yang memuat 24.167 permasalahan senilai Rp44,95 triliun. Dari jumlah permasalahan tersebut sebanyak 29,57% merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp31,49 triliun. Selain itu dari kualitas laporan keuangan juga dari total 33 provinsi hanya 16 atau 48,48% saja yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan dari 491 kabupaten/kota sebanyak hanya 156 atau 31,77% yang memperoleh opini WTP. Berdasarkan data tersebut kita dapat melihat bahwa masih banyaknya permasalahan dalam laporan keuangan dan baru sebagian kecil saja pemerintah daerah yang memiliki opini WTP mengindikasikan masih belum

transparan dalam pengelolaan keuangannya.

Fenomena di Kabupaten Indragiri Hulu, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 yakni pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Beberapa pokok temuan yang perlu untuk diperhatikan antara lain: 1) masih terdapat penganggaran dan pengakuan belanja yang belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; 2) masih belum optimalnya pengendalian atas pengelolaan pendapatan; 3) masih terdapat kekurangan volume terhadap beberapa paket pekerjaan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau

No.148B/LHP/XVIII.PEK/05/2020 dan No.148C/LHP/XVIII.PEK/05/2020).

Fenomena berikutnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi di Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Kasus ini berpindah ke Kejati setelah sejumlah pejabat di Kejari Inhu terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap 63 kepala sekolah. serta kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat. Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas menyebabkan munculnya suatu keraguan transparansi yang ada pada kasus yang terdapat pada Indragiri Hulu terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Atas permasalahan yang timbul dilapangan terdapat faktor-faktor kondisional yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari: transparansi, kompetensi, sistem akuntansi keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

Berdasarkan temuan BPK diatas Kabupaten Indragiri Hulu masih belum memiliki akuntabilitas yang baik seperti berikut: 1) permasalahan pada akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, berdasarkan LHP BPK bahwa penganggaran dan pengakuan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: a) pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyajikan anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2019 masing-masing sebesar Rp.633.921.492.343,33 dan Rp.578.143.892.941,00; b) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyajikan anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2019 masing-masing sebesar Rp.11.950.128.020,00

dan Rp.10.644.817.360,00. Dimana terdapat anggaran dan realisasi belanja pegawai dan yang merupakan belanja hibah yang berasal dari BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp.1.738.950.000,00, serta terdapat program pekerjaan hibah air limbah yang seharusnya pekerjaan tersebut tidak dianggarkan pada belanja modal tetapi belanja barang dan jasa, 2) permasalahan pada akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaan, berdasarkan LHP BPK bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada tujuh paket pekerjaan senilai Rp.249.553.626,11 dan harga satuan timpang senilai Rp. 57.997.335,50. Sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran senilai Rp.307.550.961,61; 3) permasalahan pada akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban, masih terdapatnya pengakuan belanja yang belum sesuai SAP pada Kabupaten Indragiri Hulu, serta belum optimalnya akuntabilitas yang baik sesuai dengan pasal 20 UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hal ini mengakibatkan: a) belanja pegawai lebih saji (*overstated*) dan belanja hibah kurang saji (*understated*) sebesar Rp. 844.250.000,00, b) belanja modal lebih saji (*overstated*) dan belanja barang dan jasa kurang saji (*understated*) sebesar Rp.5.222.700.157,00, c) belanja hibah kurang saji (*understated*) sebesar Rp.5.222.700.157,00; 3) permasalahan pada Akuntabilitas Pengawasan Keuangan Daerah, pengendalian atas pengelolaan pendapatan retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum optimal. Hal ini disebabkan karena pengawasan dan pengelolaan pendapatan tidak dilakukan secara periodik oleh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pertama, variabel transparansi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kewajiban untuk memberikan laporan kepada pihak lain tentang apa yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga menyangkut pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berkepentingan, dengan tingkat transparansi yang tinggi maka dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu.

Kedua, kompetensi yang merupakan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020). Apabila ASN memiliki kompetensi yang baik, maka diduga Tindakan korupsi yang merugikan daerah dan negara tidak akan dilakukan oleh ASN yang bekerja pada instansi tersebut.

Ketiga, sistem akuntansi keuangan yang meliputi pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.

Keempat, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pada temuan BPK yakni masih belum optimalnya pengendalian atas pengelolaan pendapatan tentang sistem pengendalian intern yang ditemukan BPK agar secepatnya dapat ditindaklanjuti oleh DPRD dan Bupati Indragiri Hulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2018), Hendratmi, et.al. (2017), dan Anggraini, et.al (2016) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba & Amrul (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2018), Fadhilah dan Yudianto (2018) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sweetenia, et.al. (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian Superdi, et.al (2017) menyatakan bahwa aksesibilitas, sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Lalu, dalam penelitian Rasuli, et.al (2015) menunjukkan bahwa secara parsial sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk sistem akuntansi keuangan merupakan variabel baru yang menambahkan peneliti.

Penelitian oleh Farikhoh (2019) yang menggunakan variabel penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi menunjukkan hasil berpengaruh. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah menjadi variabel moderasi untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dibutuhkan suatu sistem pengukuran kinerja.

Pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Farikhoh (2019). Penelitian ini menambahkan variabel transparansi dan sistem akuntansi keuangan sebagai variabel independen, serta menjadikan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi dikarenakan masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu dan masih sedikitnya penelitian yang dilakukan.

Sehingga, hal ini menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi (studi kasus Kabupaten Indragiri Hulu).

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai yang ada di seluruh OPD di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 45 OPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah sampel dibatasi hanya OPD yang merencanakan penyusunan anggaran dan menyusun Laporan Keuangan yaitu sebanyak 45 OPD. Selanjutnya dari masing-masing OPD yang menjadi sampel penelitian diambil 4 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program, dan staf keuangan sehingga responden jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 180 orang. Sampel yang diambil dengan 4 orang sebagai mewakili 1 OPD yang terdapat pada kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan 4 orang tersebut diharapkan sudah dapat mewakili untuk mengambil hasil penelitian yang telah dilakukan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Pada penelitian ini indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang digunakan adalah akuntabilitas perencanaan dan anggaran, akuntabilitas

pelaksanaan dan penatausahaan, akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban, dan akuntabilitas pengawasan keuangan daerah yang menggunakan instrumen dengan menggunakan 8 pertanyaan dan skala likert yang digunakan adalah skala likert 1 sampai dengan 5 poin.

Transparansi (X1)

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu. Transparansi diukur dengan menggunakan indikator informatif, keterbukaan, dan pengungkapan dengan menggunakan instrumen dengan menggunakan 5 pertanyaan dengan skala likert yang digunakan adalah skala likert 1 sampai dengan 5 poin.

Kompetensi (X2)

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi memiliki indikator yakni Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skill*), dan Sikap (*Attitude*) dengan menggunakan 6 pertanyaan dengan skala likert yang digunakan adalah skala likert 1 sampai dengan 5 poin.

Sistem Akuntansi Keuangan (X3)

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Sistem Akuntansi Keuangan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi

komputer. Sistem akuntansi keuangan diukur dengan menggunakan instrumen yakni Basis Akuntansi, Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan APBD, dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan 8 pertanyaan dengan skala likert yang digunakan adalah skala likert 1 sampai dengan 5 poin.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah menggunakan instrumen dengan indikator yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan dengan menggunakan 10 pertanyaan dengan skala likert yang digunakan adalah skala likert 1 sampai dengan 5 poin.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat tentang respon yang diberikan oleh responden, sehingga data yang berbentuk angka tersebut dapat diolah

dengan menggunakan metode statistik. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)* dengan menggunakan *software WarpPLS* versi 6.0. Analisis data SEM terdiri dari dua tahap atau lebih dikenal dengan *two step approach* sehingga dapat melakukan konfirmasi model pengukuran sekaligus mengevaluasi model struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Min	Max	Std. Dev
Transparansi	20,4833	14	25	2,33381
Kompetensi	22,6167	14	29	2,60055
Sistem Akuntansi Keuangan	34,5944	28	40	3,07758
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	39,3667	31	49	2,94057
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	35,0667	27	40	3,14918

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Menilai Outer Model atau Measurement Model

Outer model (*outer relation* atau *measurement model*) mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran atau outer model dengan indikator-indikator refleksif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk *block indicator*. Hasil *outer model* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Pengujian Validitas dan Pengujian Reliabilitas Konstruk (Outer / Measurement Model)

Konstruk	Pengujian Validitas		Keterangan	Pengujian Reliabilitas Konstruk		Keterangan
	Range	AVE		Composite Reliability	Cronbach Alpha	
Transparansi	0,769 - 0,856	0,535	Valid	0,831	0,817	Reliabel
Kompetensi	0,727	0,428	Valid	0,847	0,726	Reliabel

	0,859					
Sistem Akuntansi Keuangan	0,698 - 0,851	0,555	Valid	0,838	0,816	Reliabel
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,654 - 0,893	0,576	Valid	0,802	0,778	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,695 - 0,816	0,501	Valid	0,809	0,754	Reliabel
Transparansi* Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,612 - 0,896	0,531	Valid	0,817	0,785	Reliabel
Transparansi	0,769 - 0,856	0,535	Valid	0,831	0,817	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan *Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,647 - 0,994	0,490	Valid	0,839	0,804	Reliabel

Sumber : Output warpPLS 6.0

Berdasarkan hasil pengukuran tabel di atas, penelitian ini telah memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dari batas kritis 0,70, sehingga pada Hasil pengujian *convergent validity* telah dinyatakan valid. Hasil pengujian *composite reliability* dari setiap indikator memiliki nilai lebih besar dari 0,7 sehingga semua indikator dalam model yang diestimasi memenuhi syarat *discriminant reliability* atau telah memenuhi syarat reliabilitas.

Uji Validitas

Kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi apabila akar kuadrat AVE lebih besar dari pada koefisien korelasi antar konstruk pada masing-masing kolom. Kriteria yang digunakan adalah akar kuadrat (*square roots*) *average variance extracted (AVE)* yaitu kolom diagonal dan diberi huruf *bold* (tebal) nilainya harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama (diatas atau dibawahnya). Hasil validitas diskriminan pada penelitian ini tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3 Validitas Diskriminan (Correlations Among Latent Variables)

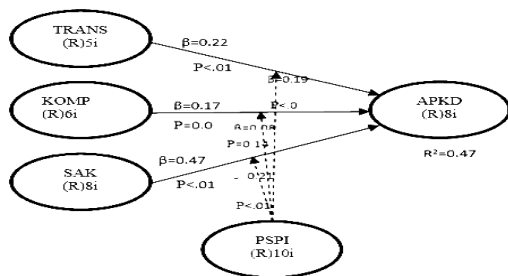
	APKD	TRANS	KOM	SAK	PSPI	PSPI *SAK	PSPI *KOM	PSPI *TRANS
APKD	(0.725)	0.422	0.149	0.652	0.074	0.249	0.170	0.147
TRANS	0.452	(0.750)	0.602	0.149	0.377	0.247	0.161	0.136
KOM	0.049	0.602	(0.743)	0.287	0.305	0.164	0.035	0.067
SAK	0.552	0.349	0.287	(0.714)	0.553	0.347	0.124	0.125
PSPI	0.114	0.377	0.305	0.553	(0.793)	0.247	0.186	0.134
PSPI *SAK	0.219	0.247	0.164	0.347	0.247	(0.624)	0.488	0.354
PSPI *KOM	0.291	0.061	0.015	0.034	0.186	0.388	(0.352)	0.170
PSPI *TRANS	0.177	0.156	0.025	0.222	0.134	0.254	0.170	(0.480)

Sumber : Output warpPLS 6.0

Matriks korelasi pada tabel tersebut menunjukkan terdapat pengaruh antara setiap variabel di atas. Hasil ini menunjukkan indikasi awal dukungan terhadap hipotesis moderasi karena hubungan moderasi mensyaratkan variabel pemoderasi tidak berkorelasi signifikan dengan variabel independen dan dependen.

Pengujian Variabel Penelitian

Prosedur pengujian Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variabel pemoderasi pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Hasil Pengujian Variabel Penelitian

Sumber: Output warpPLS 6.0

Dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai beta 0.22 dengan signifikansi

P<.01, kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai beta 0.17 dengan signifikansi P=0.0, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai beta 0,47 dengan signifikansi P<.01.

Hasil pengujian model moderasi disajikan untuk menunjukkan hasil estimasi *full model* dan kriteria *goodness of fit*. Ketentuan *model fit indices and P value* yang menampilkan 3 indikator *fit* yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-squared* (ARS), dan *average variance inflation factor* (AVIF) harus terpenuhi yaitu apabila nilai P untuk APC dan ARS lebih kecil dari 0,05 atau berarti signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indikator multikolinearitas harus lebih kecil dari 5. Hasil pengujian *goodness of fit* dalam penelitian ini tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4 Pengujian Model Moderasi (Goodness of Fit)

No	Jalur	Full Model	
		Koef	Pvalue
1	APC	0.257	<0.001
2	ARS	0.510	<0.001
3	AVIF	1.314	<5

Sumber: Output warpPLS 6.0

Hasil di atas menunjukkan kriteria *goodness of fit* telah terpenuhi, yaitu nilai APC dan ARS signifikan secara statistik dan AVIF kurang dari 5. Hasil diatas menunjukkan bahwa persyaratan untuk pengujian model moderasi diterima.

Selanjutnya, pengujian pengaruh moderasi diketahui dari nilai *effect size* yang didapat. Berikut disajikan tabel *effect size*:

Tabel 5 Hasil Uji Variabel (Effect Size)

	TRANS	KOM	SAK	PSPI *SAK	PSPI *KOM	PSPI *TRANS
APKD	0.216	0.115	0.454	0.584	0.091	0.311

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *effect size* atau ukuran efek antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.216. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien *direct effect* transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada model adalah sebesar 0.221 dengan signifikansi <0.001 yakni < 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa (H1) diterima yaitu ada pengaruh antara transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *effect size* atau ukuran efek antara kompetensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.115. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien *direct effect* kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada model adalah sebesar 0.168 dengan signifikansi 0.024 yakni < 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa (H2) diterima yaitu ada pengaruh antara kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *effect size* atau ukuran efek antara sistem akuntansi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.454. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien *direct effect* sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada model adalah sebesar 0.473 dengan signifikansi <0.001 yakni < 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa (H3) diterima yaitu ada pengaruh antara sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa *effect size* antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat setelah dimoderasi penerapan sistem

pengendalian internal pemerintah yakni sebesar 0.311. Dengan demikian, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terbukti memperkuat pengaruh antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Efek moderasi pada model adalah sebesar 0.191 dengan signifikansi <0.001 yakni < 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa (H4) diterima yaitu ada pengaruh antara transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah jika dimoderasi oleh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran efek antara kompetensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan sistem pengendalian internal pemerintah tidak dapat dibuktikan karena nilai signifikansi efek moderasi pada model adalah sebesar 0.082 dengan tidak signifikan yakni 0.141 yakni > 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa (H5) ditolak yaitu tidak ada pengaruh antara kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah jika dimoderasi oleh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

Hasil uji menunjukkan bahwa *effect size* antara sistem akuntansi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat setelah dimoderasi sistem akuntansi keuangan yakni sebesar 0.584. Dengan demikian, sistem akuntansi keuangan terbukti memperkuat pengaruh antara sistem akuntansi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Efek moderasi pada model adalah sebesar 0.208 dengan signifikansi <0.001 yakni < 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa (H6) diterima yaitu ada pengaruh antara sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah jika dimoderasi oleh penerapan

sistem pengendalian internal pemerintah.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian variabel transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hulu. Apabila setiap OPD menerapkan transparansi secara jelas dan sesuai dengan visi dan misi di kabupaten Indragiri Hulu, maka akan terwujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan yaitu dana publik tadi ditetapkan dan digunakan secara lega yakni jika pengelolaan anggaran semakin transparan didalam menjalankan dan mendampingi serta dapat mencerminkan keterbukaan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan akan semakin baik pula. Berpengaruhnya transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hulu membuktikan bahwa OPD di daerah tersebut telah menerapkan transparansi sehingga terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh Hendratmi, et.al (2017); Rosyidi (2018); Anggraini, et.al (2016) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah dikarenakan Sehingga semakin baiknya transparansi maka akan semakin meujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik pula.

Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian variabel kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hulu. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah yang merupakan sebuah wadah yang bertugas untuk melayani masyarakat. Sehingga diperlukan kompetensi yang baik agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan cara melakukan pengujian keahlian dan adanya pelatihan yang sering dilakukan oleh pegawai guna untuk meningkatkan mutu dan kompetensinya. Berpengaruhnya kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hulu membuktikan bahwa pegawai yang terdapat pada OPD di daerah tersebut telah memiliki kompetensi yang baik didalam mewujudkannya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh Hendratmi, et.al (2017); Rosyidi (2018); Anggraini, et.al (2016), Terkait pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian variabel sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hulu. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis ketiga yang menduga adanya pengaruh positif sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Berpengaruhnya sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hulu membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan pada OPD didaerah tersebut telah dijalankan secara efektif dan efisien sehingga dapat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah didaerah tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Asfiryati, et.al (2017), Rasuli, et.al (2015) dan Kurnia (2014) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Semakin baiknya sistem akuntansi keuangan yang dilakukan daerah maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memoderasi Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada kabupaten Indragiri Hulu. Dapat diartikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada OPD mampu memperkuat hubungan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimilikinya. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis keempat yang menduga bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diterima. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mengarahkan dan mengawasi sumber daya pemerintah dalam mencapai tujuan serta berperan penting didalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Maka dari itu, dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah diterapkan dengan efektif, maka pemerintah mampu membuat transparansi yang lebih baik untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah maka akan menciptakan transparansi yang baik dan didukung dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik pula maka akan memperkuat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang menyatakan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan didukung faktor lain seperti penerapan sistem pengendalian internal yang didukung oleh Widyatama, et.al (2017), Martini, et.al (2019).

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memoderasi Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dibuktikan jika dimoderasi oleh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada kabupaten Indragiri Hulu. Dapat diartikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada OPD tidak mampu memperkuat hubungan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimilikinya. Kompetensi yang dimiliki menjadi syarat utama agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan dengan maksimal.

Namun tidak hanya itu semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki maka penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang digunakan tidak mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi mejadi suatu faktor yang penting dikarenakan merupakan faktor internal dari dalam diri masing masing individu. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapati bahwa individu yang memiliki kompetensi pada kabupaten Indragiri Hulu cenderung akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dikarenakan semakin tinggi kompetensi yang mereka miliki semakin tinggi pula komitmen yang mereka miliki sehingga tanpa adanya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah individu tersebut tetap mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis kelima yang menduga bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh

transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditolak.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan yang dilakukan Budiati, et.al (2019) dan berdasarkan dengan uraian tersebut individu yang memiliki kompetensi cenderung tidak menerima penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dikarenakan salah satunya menurut individu tersebut mereka mampu dan yakin dengan kemampuan mereka untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan ada atau pun tidak nya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang mungkin kurang efektif sehingga individu tersebut lebih mempercayai kompetensi yang dimilikinya.

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada kabupaten Indragiri Hulu. Dapat diartikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada OPD mampu memperkuat hubungan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimilikinya. Laporan keuangan harus memiliki kriteria akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang benar dengan didukung sistem akuntansi keuangan yang baik dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta instansi – instansi yang

berkaitan, dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik maka akan memperkuat hubungan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis keenam yang menduga bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diterima.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Asfiryati, et.al (2017), Rasuli, et.al (2015) dan Kurnia (2014) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan didukung faktor lain seperti penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Beberapa saran yang diajukan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden yang lebih bervariasi dan memperluas cakupan sampel yang digunakan.

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Misalnya dengan menambah penelitian *value for money*, realisasi anggaran, pemanfaatan teknologi dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant factors influencing the accountability of village financial management. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(1), 1-9.
- Asfiryati, D., Savitri, E., & Al Azhar, A. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Angraini, D. Y., Agusti, R., & Anggraini, L. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2019). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *Ekuitas (Jurnal*

- Ekonomi dan Keuangan*), 3(4), 425-444.
- Farikhoh, I. (2019). *PERAN Pemanfaatan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Dari Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap), Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Keuangan (Studi Pada SKPD-SKPD di Pemerintah Kota Tegal)* (Doctoral dissertation, UNNES).
- Fhadillah, S. N., & Yudianto, I. (2018). The Influence of Application Government Internal Control System, Asset Management and Human Resources Competencies to Financial Accountability. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1), 58-68.
- Hendratmi, H., Mulyadi, J. M. V., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2), 76-93.
- Kurnia, I. (2014). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). *Jurnal akuntansi*, 2(1).
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 2(1).
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 140-152.
- Rosyidi, M., Azlina, N., & Putra, A. A. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB*, 1(1), 1-14.
- Rasuli, M., Kurnia, P., & Lily, L. (2015). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Suharti, & Tannia, Y. (2020). Analisis Pengaruh Debt to Equity Ratio, Debt to Asset Ratio, Price Earning Ratio dan Price to Book Value Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Pertanian. *INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 13-26.
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44-56.

- Superdi, S., Rasuli, M., & Silfi, A. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2).